

PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANA

Yusafri Rasyidin

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
yusafriarasidyidin@radenintan.ac.id

Diterima: 24 Mei 2022

Disetujui: 26 Mei 2022

Dipublikasikan: 30 Mei 2022

Abstract

Hasan al-Bana is a charismatic figure who is loved by his followers. The way he leads his congregation is like a Sufi sheikh leading his tarekat, in his movement al-Bana is very concerned about the function of each component of his organization. In politics, al-Bana provides several discussions and all of them are based on the correct understanding of Islam as a complete and comprehensive way of life. The discussions are: 1) Urubah (Arabism), 2) Wathaniyah (Patriotism), 3) Qauniyah (Nationalism), 4) Alamiyah (Internationalism). In the activities of political movements, there are three main steps that must be passed: the Ta'rif stage (Introduction/stages), Takwin (Formation), and Tanfiz (Implementation). The stages mentioned above show the systematic steps of a movement in achieving its goals. The influence of Hasan al-Bana's thought on the emergence of political parties in Indonesia is in terms of Islamism (his thoughts on Syumuliatul Islam/universal Islam), Patriotism (love of the homeland), and Nationalism (the next generation who must follow in the footsteps of their predecessors). The process of transforming Hasan's thought al-Bana to Indonesia, namely through the social interactions of Tarbiyah movement activists on campuses throughout Indonesia, and Hasan al-Bana's works through books containing the thoughts and ideological values of al-Ikhwan, both written directly by Hasan al-Bana and al-Ikhwan figures.

Keywords: *Thought, Hasan al-Bana, Politics*

Abstrak

Hasan al-Bana merupakan tokoh karismatik yang begitu dicintai oleh pengikutnya. Cara memimpin jamaahnya sebagai seorang syekh sufi memimpin tarekatnya, dalam gerakannya al-Bana sangat memperhatikan fungsi setiap komponen organisasinya. Dalam perpolitikan al-Bana memberikan beberapa pembahasan dan semuanya itu berpijak pada pemahaman yang benar terhadap Islam sebagai pedoman hidup yang paripurna dan komprehensif. Pembahasan tersebut adalah: 1) Urubah (Arabisme), 2) Wathaniyah (Patriotisme), 3) Qauniyah (Nasionalisme), 4) Alamiyah (Internasionalisme). Dalam aktivitas gerakan politik menetapkan tiga langkah pokok yang harus dilalui: Tahap Ta'rif (Pengenalan/tahapan), Takwin (Pembentukan), dan Tanfiz (Pelaksanaan). Tahapan-tahapan tersebut diatas menunjukkan langkah-langkah sistematis dari suatu gerakan dalam mencapai tujuannya. Dalam pengaruh pemikiran Hasan al-Bana terhadap munculnya partai

perpolitikan di Indonesia adalah dari segi Islamisme (pemikirannya tentang Syumuliatul Islam/universal Islam), Patriotisme (cinta tanah air), dan Nasionalisme (generasi penerus yang harus mengikuti jejak para pendahulunya. Proses transformasi pemikiran Hasan al-Bana ke Indonesia yakni melalui interaksi sosial para aktivis gerakan Tarbiyah yang ada dikampus-kampus di seluruh Indonesia, dan karya-karya Hasan al-Bana melalui buku-buku yang memuat pemikiran dan nilai-nilai ideologi al-Ikhwan, baik yang ditulis langsung oleh Hasan al-Bana maupun tokoh-tokoh al-Ikhwan.

Kata Kunci : Pemikiran, Hasan al-Bana, Politik

Pendahuluan

Pemikiran politik seperti dikatakan Hamid Enayat, merupakan persoalan yang paling banyak digeluti oleh kaum intelektual Muslim selama dua abad terakhir ini. Hal ini dapat dijelaskan terutama oleh perjuangan yang tengah berlangsung di berbagai negeri Muslim untuk memperoleh kemerdekaan politik dan kebebasan dari ketergantungan kekuatan-kekuatan Barat, baik dalam bentuk kolonialisme maupun dari hegemoni, termasuk didalamnya hegemoni pemikiran.¹

Selain itu faktor lain yang dapat menjelaskan kenyataan diatas juga antara lain: 1. Karena pesona politik yang kuat bagi banyak orang, sehingga dalam Islam merupakan persoalan yang pertama muncul bahkan dari sanalah lahir persoalan teologi² dan 2. “provokasi” sebagai Barat yang melihat Islam secara politik dalam pandangan yang monolitik berkonotasi otoriter sebagai muslim, para intelektual muslim tentu saja ingin memperlihatkan bahwa meskipun pandangan itu dalam beberapa hal bisa dibenarkan, tetapi tidak untuk keseluruhan Islam, terutama jika di lihat dari pemikirannya. Pemikiran politik Islam sangatlah kaya atau bersifat *poly interpretable*, sehingga bagi mereka sulit menerima cap otoritarianisme secara keseluruhan dari para pengamat Barat itu.

Dari uraian di atas dapatlah penulis paparkan bahwa para pemikir Islam diantaranya Hasan al-Bana muncul dengan beberapa pokok pikirannya dan diantaranya tentang politik agar bisa memberi penjelasan tentang beberapa pandangan para dunia Barat yang mengatakan bahwa politik Islam itu otoriter. Dibawah penulis akan memberikan beberapa pemikiran Hasan al-Bana tentang politik dan pengaruh lahirnya partai politik Islam di Indonesia.

A. Biografi Hasan al-Bana

Hasan al-Bana dilahirkan di desa Al Mahmudiyah yang berada di wilayah al Bahirah, di kawasan pedalaman Mesir, 1324 H (September 1906 M). Ayahnya bernama

¹ Sukron Kamil, *Pemikiran politik Islam tematik: agama dan negara, demokrasi, civil society, syariah dan HAM, fundamentalisme, dan antikorupsi*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), h.1.

² Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jilid II*, Cet. 6 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h.31.

Syekh Ahmad Abdur Rahman al-Bana, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an. Masa kecil Hasan al-Bana dilalui dengan belajar tahfidzh Al-Qur'an yang dipelajari langsung melalui ayahnya. Sementara itu pendidikan dasar formal dilalui Hasan al-Bana di Madrasah Diniyah al-Rashad, Madrasah tersebut dikelola oleh pemerintah. Pada usia 12 tahun, ia pernah menyaksikan praktek zikir tarekat al-Hanafiah dan menangkap kesan tentang kelapangan hati dan kesholehan orang tua serta kemurahan hati orang muda. Sejak itu nama Syekh Hanafiyah, guru tarekat tersebut melekat kuat didalam hatinya³

Pada tahun 1923 Hasan al-Bana melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah tinggi di Dar al Ulum Kairo. Selama belajar di Kairo hubungannya dengan tarekat Hanafiyah tidaklah terputus. Ia tetap terlibat dengan tarekat ini melalui cabang Kairo. Namun yang sangat menarik di perhatikan adalah bahwa selama di Kairo, Hasan al-Bana banyak terlibat dengan perkembangan pemikiran atau situasi politik yang sedang melanda Mesir.⁴

Pada masa remaja Hasan al-Bana, dunia Islam sedang mengalami stagnansi kepemimpinan Khilafah, yaitu kerugian Turki Usmani tidak lagi mampu menjalankan roda pemerintahan yang stabil. Situasi itu memuncak dengan runtuhnya Khilafah Turki Usmani dan diproklamasikan Republik Turki modern sekuler oleh Musthafa Kemal Attaturk tanggal 2 Maret 1924 (26 Rajab 1342 H). Menjelang akhir studinya di Kairo, Hasan al-Bana menyusun memorinya pada tahun 1927. Sementara itu pelajaran berharga yang didapatnya selama belajar di Kairo adalah kemampuan mengorganisasi massa dan menggerakkan mereka dalam kegiatan penyadaran umat melalui khotbah di Masjid sampai ke kedai kopi.

Pada tanggal 19 September 1927, ia tiba di Ismailiyah, pada waktu itu ia berusia 21 tahun dan baru tamat dari Dar al Ulum. Di kota itu ia bertugas mengajar di sekolah pemerintah, tak lama kemudian pada tahun 1928 ia mendirikan Al Ikhwan al-Muslimin yang memiliki kemiripan dengan gerakan YMMA (adalah Asosiasi Pemuda Muslim) Hasan al-Bana mendirikan organisasi ini karena ia tidak puas terhadap YMMA yang hanya terjebak pada persoalan politik.⁵

Setelah Hasan al-Bana kembali ke Kairo, ia memboyong gerakan Al Ikhwan kesana dan jadilah Al Ikhwan sebagai gerakan nasional di Mesir pada tahun 1932. Gerakan Al Ikhwan semakin mendapat tempat dihati umat Islam, khususnya ketika pasukan Al Ikhwan maju ke medan perang Arab Israil. Melihat kondisi ini, kemudian Al Ikhwan semakin meyakinkan diri untuk muncul sebagai gerakan politik. Namun sebagai suatu gerakan Al Ikhwan juga mengalami masa fitnah. Pada tahun 1948, Al Ikhwan di bubarkan oleh pemerintahan Mesir, pembubaran itu berawal dari kesenjangan koordinasi gerakan ini

³ Nasution, h.303.

⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran politik Islam: dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010), h.191.

⁵ Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ed., *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h.304.

dengan pemerintahan Mesir ketika itu. Kulminasinya adalah terbunuhnya Hasan al-Bana pada tahun 14 Rabiul akhir 1367 H, bertepatan dengan 12 Februari 1949.⁶

B. Karya-karya Hasan al-Bana

Hasan al-Bana tidak banyak memiliki karya tulis, karena sebagian besar perhatiannya tercurah kepada soal pendidikan dan berdakwah. Sebagai pelopor organisasi Ikhwan Muslim dan penggerak dalam bidang dakwah memurnikan syari'at Islam, ia lebih banyak berpidato dibandingkan menulis. Namun demikian, ada beberapa karya tulis yang sempat dirampungkan penyusunannya dan merupakan warisan yang tiada tara hingga saat ini yaitu:

1. Majmu'at al-Rosail (Kumpulan Makalah Hasan al-Bana)
Kumpulan tersebut berisikan pemikiran dan pandangan Hasan al-Bana tentang berbagai masalah ummat Islam dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya.
2. Al-Washaya al 'asyar (Sepuluh Wasiat)
Buku tersebut berisi sepuluh nasehat yang harus direnungkan dan diamalkan bagi setiap insan muslim, meliputi masalah ibadah, akhlak, muamalat dan lain-lain.
3. Muzdakirat al Dakwah wa Da'iyyah (Catatan Harian Dakwah dan Da'i).
4. Majmu'ah Rosail (Kumpulan Surat-surat).
5. Nazkarat Fi Al-Qur'an (Kumpulan Ceramah Hasan al-Bana tentang pandangan dan Kajiannya terhadap Al-Qur'an).
6. Muqaddimah Fi Ilmi al Tafsir (Pengantar Ilmu Tafsir).
7. Risalahtain Fi al Tafsir wal Surati al Fatihah (Dua Makalah tentang Tafsir Surat al Fatihah.
Selain itu Hasan al-Bana mewariskan semangat dan teladan dakwah bagi seluruh aktivitas dakwah sepanjang zaman.

C. Pemikiran Politik Hasan al-Bana

Politik dalam konteks sebuah negara adalah untuk memberikan perlindungan serta keadilan kepada semua warga negara yang ada di dalam sebuah wilayah. Kehidupan manusia yang nyaman dan tentram tidak akan dapat tercapai tanpa adanya penataan politik yang baik.⁷ Sesungguhnya ada perbedaan antara kepartaian dan politik, keduanya mungkin bersatu ataupun berpisah dalam partai pastia adanya politik, namun berpolitik juga tidak harus melalui partai. Dengan adanya pandangan bahwa manusia itu harus hidup berdampingan, maka akan munculah saling membutuhkan antar sesama. Dari sikap saling membutuhkan itu hendaklah siapa yang membedakan antara manusia dalam sebuah negara itu dihilangkan. Tetapi maksud menghilangkan perbedaan ini hanya sebatas urusan dunia semata. Dalam pemikiran politik, marilah kita lihat konsep Hasan al-Bana :

1. Konsep-konsep Pemikiran Politik Hasan al-Bana
 - a. 'Urubah (Arabisme)

⁶ Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, h.302.

⁷ Hasan al-Bana, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2* (Solo: Era Intermedia, 2012), h.65.
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 18 Januari—Juni 2022

Bangsa Arab adalah umat dan penduduk yang pertama kali menerima kedatangan Islam. Selain Arab juga merupakan bangsa yang terpilih. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “Jika bangsa Arab hina, maka hina pulalah Islam”. Hasan al-Bana mengatakan Islam tidak akan bangkit tanpa adanya kebulatan pandangan tentang kebangkitan dari bangsa-bangsa Arab. Oleh karenanya beliau berprinsip bahwa setiap jengkal tanah di Jazirah Arab adalah bagian dari induk tanah air Islam dan inti dari Negara Islam.⁸

b. Wathaniyah (Patriotisme)

Mengenai patriotisme Hasan al-Bana mengatakan suatu kekeliruan bagi orang-orang yang menyangka bahwa Ikhwanul Muslim berputus asa terhadap kondisi negeri dan tanah airnya. Sesungguhnya kaum muslimin adalah orang-orang yang paling ikhlas berkorban bagi Negara, habis-habisan berkhidmat untuknya, dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan ikhlas dalam membelanya. Adapun prinsip patriotisme ikhwanul muslimin, cukuplah bahwa mereka meyakini dengan kukuh bahwa sikap acuh terhadap sejengkal tanah yang ditinggali. Seorang muslim yang terampas merupakan tindak kriminal yang tidak terampuni, sampai kita mau berjuang dan berhasil mengembalikan kemerdekaannya atau kita hingga dapat mengembalikannya atau hancur dalam mempertanggung jawabnya.⁹

Adapun tujuan dari patriotisme menurut Hasan al-Bana adalah:

Patriotisme hanya berfikir untuk membebaskan negerinya. Apabila mereka membangun negerinya, mereka hanya memperhatikan aspek-aspek fisik seperti yang kini terjadi di Eropa. Adapun kami percaya bahwa di pundak setiap muslim terpikul amanah besar untuk mengorbankan seluruh jiwa, darah dan hartanya demi membimbing umat manusia menuju cahaya Islam.¹⁰

c. Qauniyah (Nasionalisme)

Dalam prinsip nasionalisme Hasan al-Bana menetapkan nasionalisme kita berfokus pada sikap loyal (wala’) total pada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Hal ini banyak kita temukan dalam al-Qur’an dan Hadist Nabi.¹¹

Dari ayat-ayat al-Qur’an itu dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bangga dengan penobatan dalam hal nasionalisme dan sejarah serta penapak tilasan salafus saleh oleh generasi muda.
- 2) Skala prioritas perhatian nasionalisme pada lahirnya kebajikan untuk mereka.
- 3) Memerangi kebanggaan atas etnis, kebangsaan dan tradisi jahiliyah.
- 4) Faham nasionalisme kita pada loyalitas yang utuh kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman.

d. ‘Alamiyah (Internasionalisme)

Dalam internasionalisme Hasan al-Bana mengatakan bahwa Internasionalisme atau humanisme adalah sasaran tertinggi, tujuan terakhir dakwah kami dan lingkaran

⁸ Hasan al-Bana, h.186.

⁹ Abdul Hamid Al Ghazali, “Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan al- Bana” (Era Intermedia, 2001), h.196.

¹⁰ Abdul Hamid Al Ghazali, h.197.

¹¹ Abdul Hamid Al Ghazali, h.198.

terakhir dari serial program perbaikan. Dunia tidak bisa tidak bergerak mengarah kesana. Persatuan antar bangsa perhimpunan antar suku dan ras, bersatunya sesama pihak yang lemah untuk memperoleh kekuatan dan bergabungnya mereka yang terpisah untuk mendapatkan hangatnya persatuan, semua itu merupakan pengantar menuju terwujudnya kepemimpinan prinsip internasionalisme untuk menggantikan pemikiran rasionalisme dan kesukuan yang diyakini umat manusia sebelum ini. Dahulu memang harus meyakini untuk menghimpun unsur-unsur dasar, lalu harus dilepaskan kemudian untuk menggabungkan berbagai kelompok besar, setelah itu terwujudlah kesatuan total diakhirnya.¹²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Dakwah menuju persaudaraan kemanusiaan dan persatuan Internasionalis
- 2) Memberantas fanatisme golongan dan kesukuan
- 3) Dakwah menuju system dunia baru, namun diatas pondasi nilai yang adil
- 4) Menghargai undang-undang Negara dengan syarat pelaksanaannya dilakukan dengan adil dan tidak diskriminatif.

D. Aktivitas Politik

Dalam bagian ini ada tiga hal yang perlu dijelaskan yaitu tujuan, target dan kerja politik.

1. Tujuan

Dalam berbagai risalah Hasan al-Bana menjelaskan tentang tujuan dari politiknya: Pertama, pembebasan tanah air Islam. Kedua, berdirinya daulah Islam di Negara-negara yang telah bebas dari pengaruh asing. Ketiga, penyatuan tanah air Islam, yaitu agar setiap jengkal dari negeri Islam ini bergabung dalam satu kesatuan. Keempat, mewujudkan persatuan Arab, sebab persatuan Arab adalah keniscayaan demi mengembalikan kejayaan Islam, tegaklah daulah dan kehormatan kekuasaannya. Kelima, yaitu perwujudan Islam. Hasan al-Bana menegaskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan suku bangsa dan warna kulit. Kaum muslimin adalah umat yang satu dan tanah air Islam adalah tanah air yang satu, meskipun berjauhan letak dan beragam batas-batasnya. Hasan al-Bana memasyarakatkan persatuan dan bekerja keras untuk menyatukan kata dan menegakkan kehormatan ukhwh Islamiyah. Hasan al-Bana berjuang untuk memerdekakan, menyelamatkan, membebaskan dan mempersatukan daerah-daerah yang diatasnya terdapat muslim yang menyerukan kalimat *Laa Ilaha Illallah*.

Dari paparan diatas nampaklah bahwa Hasan al-Bana bertujuan berusaha mengembalikan seluruh kejayaan negeri untuk kemaslahatan umat Islam dan tegaknya kembali kekuasaan khilafah yang telah hilang serta terwujudnya persatuan yang dicita-citakan bersama.

2. Strategi

Hasan al-Bana meyakini bahwa untuk mencapai tujuan dikembangkan strategi yang tepat dengan menggunakan banyak pola dan sarana. Namun apapun strategi yang akan diterapkan secara prinsip tidak bertentangan dengan akar syariat dan tetap

¹² Abdul Hamid Al Ghazali, h.202.
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 18 Januari—Juni 2022

berorientasi menuju kemaslahatan yang dominan. Diantara strategi yang dipakai oleh Hasan al-Bana adalah:

- 1) Melakukan kegiatan jurnalistik atau melakukan aktivitas informasi yang intens melalui media-media pamflet, koran, majalah, radio dan pertemuan-pertemuan.
- 2) Menasehati pemimpin, baik berdialog secara langsung maupun melalui surat seperti yang telah dilakukan terhadap perdana menteri dan raja serta pejabat pemerintah lainnya.
- 3) Menjalani hubungan dengan orang-orang lembaga konstitusi, membentuk komite-komite perundangan dan mengajukan berbagai usulan.
- 4) Menyiapkan berbagai program perbaikan dan penyampaian program tersebut kepada pihak yang berwenang.
- 5) Membuat stratmen politik yang menjelaskan sikap jama'ah.
- 6) Memasuki dewan-dewan perwakilan (parlemen) mendirikan atau terlibat aktif dalam kepartaian.
- 7) Menulis tuntutan-tuntutan politik secara jelas.
- 8) Membangun aliansi-aliansi politik.¹³

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa untuk strategi khusus di bidang politik adalah dari point 5 sampai nomor 8 sedangkan 1 sampai 4 tidak berbeda dengan strategi dalam bidang-bidang lainnya seperti bidang dakwah, ekonomi, pendidikan dan sosial.

3. Langkah-langkah (Tahapan)

Salah satu karakteristik gerakannya adalah bertahap dalam setiap melangkah, termasuk dalam aktivitas politik. Hasan al-Bana telah menetapkan tiga tahap yang harus dilalui yaitu: Pertama, tahap Ta'aruf (pengenalan). Pada tahap ini masyarakat mengenal dengan baik tentang wawasan dan muatan politik. Pengenalan itu di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan pemikiran secara benar kepada masyarakat.
- 2) Mengetahui secara detail hakikat jama'ah.
- 3) Revitalisasi peran ulama dalam politik.
- 4) Meletakkan politik sebagai pengendali aktivitas.

Kedua, tahapan Takwin (pembentukan). Tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian unsur-unsur yang aktif dan pembangunan berbagai lembaga. Karakteristik pada tahap ini adalah :

- 1) Pembentukan komite perundang-undangan.
- 2) Pembentukan komite peradilan.
- 3) Penyiapan program perbaikan yang integral dan komprehensif dan;
- 4) Analisis secara sistematis realistik yang ada.

Ketiga, tahap Tanfidz (pelaksanaan). Pada tahap ini aktivitas politik mentransformasikan program-program medan aplikasi dan aksi dengan cara:

- 1) Berusaha masuk dalam majelis parlemen (dewan-dewan perwakilan).
- 2) Mobilisasi massa.
- 3) Meningkatkan nilai tawar (tuntutan).

¹³ Abdul Hamid Al Ghazali, h.206.
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 18 Januari—Juni 2022

Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan langkah-langkah sistematis dari suatu gerakan dalam mencapai tujuan. Perjuangan politik Hasan al-Bana ternyata tidak hanya berorientasi pada sasaran yang hendak dicapai, seperti terbebasnya negeri-negeri Islam dari kekuasaan asing dan persatuan umat Islam, melainkan juga dilandasi oleh suatu proses dan prosedur baku sebagaimana tampak dalam tahapan-tahapan tersebut. Hal seperti ini selalu ada pada setiap aktivitas gerakan Hasan al-Bana, baik dibidang dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial maupun dibidang politik.

E. Sikap Politik Hasan al-Bana

Dalam masalah sikap politik Hasan al-Bana sesuai dengan tujuan, strategi dan tahapan-tahapan sikap politiknya. Dalam beberapa risalahnya, beliau menjelaskan diantaranya yang berkenaan dengan beberapa persoalan yakni:

1. Pemerintahan

Bagi Hasan al-Bana pemerintahan dijadikan suatu pilar dalam sebuah bangunan. Mengenai karakter pemerintahan yang diserukan, Hasan al-Bana tidak menyakini sistem apapun yang tidak berpangkal dari ajaran-ajaran Islam. Bagi beliau menegakkan syariat Islam adalah wajib, dan berdiam diri tak menuntut berlakunya hukum Islam adalah suatu kejahatan. Jika saja telah ada sekelompok umat yang siap memikul amanat dan berhukum dengan sistem Qur'ani, beliau siap sebagai pembelanya. Jika tidak beliau bekerja keras untuk mewujudkannya, tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam.

2. Undang-undang Dasar

Menurut Hasan al-Bana, undang-undang dasar adalah sistem hukum yang bersifat global yang mengatur batas-batas kekuasaan, kewajiban penguasa dan hubungan dengan rakyat.¹⁴ Hasan al-Bana melihat bahwa undang-undang dasar Mesir prinsip-prinsipnya adalah konsistensi didunia ini yang masih berlaku dan paling dekat kepada Islam. Beliau tidak mau menggantinya dengan yang lain. Undang-undang dasar harus memuat prinsip keseimbangan antar berbagai disiplin institusi yang berada dalam pengawasan Negara, sehingga yang satu tidak menindas yang lain juga harus memuat berbagai kaidah buku yang mengakomodasi kebebasan umum dan khusus bagi individu masyarakat.

3. Undang-undang

Berbeda dengan undang-undang dasar, menurut Hasan al-Bana undang-undang adalah system yang mengatur hubungan antar sesama individu, melindungi hak-hak moral dan material, mengontrol apa-apa yang mereka kerjakan.¹⁵ Hasan al-Bana mengatakan bahwa Islam datang dengan prinsip-prinsip syariat (perundang-undangan). Al-Qur'an dan Sunnah Nabi syarat dengan muatan ini. Hasan al-Bana menolak undang-undang yang bertentangan dengan Islam, landasannya adalah Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 44,45,47,49 dan 50.

4. Kepartaian

Tentang partai politik, Hasan al-Bana bersikap apriori. Hal ini karena sebab-sebab negatif dalam praktek kepartaian dan tidak menghendaknya dan juga tidak

¹⁵ Ibid, hal 210

¹⁴ Abdul Hamid Al Ghazali, h.210.

¹⁵ Abdul Hamid Al Ghazali, h.210.

sepakat dengannya. Hasan al-Bana yakin, partai-partai politik yang ada di Mesir didirikan dalam suasana yang khusus, karena didorong ambisi pribadi bukan demi kemaslahatan umum. Beberapa sisi negatif kepartaian telah merusak semua keindahan tatanan kehidupan, merusak moral dan menceraikan umat.

5. Minoritas dan Orang Asing

Sikap Hasan al-Bana terhadap minoritas senantiasa disandarkan kepada ajaran Islam. Menurut Hasan al-Bana, Islam tidak menciptakan sebuah sistem yang suci dan arif kecuali pasti mencakup perlindungan terhadap masyarakat minoritas.¹⁶ Islam mensakralkan kesatuan kemanusiaan dan mensakralkan persatuan keagamaan secara umum. Islam memotong akar fanatisme dan menghancurkan penganutnya mengimani semua risalah langit.

6. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Dalam masalah ini Hasan al-Bana berpegang pada prinsip umum bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat prinsip persamaan. Perempuan adalah bagian dari laki-laki dan laki-laki juga bagian dari perempuan. Islam mengakui hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak-hak politik seutuhnya. Islam memperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Ia mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban harus dipenuhi. Ijtihad Hasan al-Bana menggariskan bahwa perempuan memiliki hak partisipasi dalam pemilihan umum dan hak pilih umum dan hak pilih menjadi anggota dewan, hak memegang tanggung kepemimpinan selain khalifah. Adapun jabatan hakim beliau masih membuka pintu ijtihad.

7. Demokrasi

Hasan al-Bana memegang teguh prinsip demokrasi dengan keyakinannya pada proses musyawarah. Menurut Hasan al-Bana perbaikan politik adalah pintu masuk yang hakiki untuk seluruh perbaikan. Perbaikan bermula dari proses pemilihan umum yang konstitusional. Mengenai prinsip demokrasi Hasan al-Bana berpegang pada prinsip kedaulatan, kebebasan perwakilan, jaminan hak dan penegak hukum. Dalam merespon demokrasi, Hasan al-Bana mengakui perlunya sistem parlementer. Ia bahkan tidak mengharamkan sistem banyak partai, namun karena di Mesir lebih banyak menyebabkan perpecahan, maka al-Bana mengemukakan pembubaran partai-partai tersebut dan dibentuk partai-partai yang mempersatukan bangsa dan mengupayakan pembaharuan internal.¹⁷

8. Persatuan

Model persatuan menurut Hasan al-Bana terdiri dari persatuan nasional, persatuan Arab dan persatuan Islam, serta persatuan Internasional. Persatuan nasional implikasi adalah bahwa setiap orang harus bekerja untuk kebaikan dan berkhidmat kepada tanah airnya. Hasan al-Bana mencintai tanah airnya berusaha menjaga persatuan nasionalnya. Al-Ikhwan adalah orang-orang yang paling peduli akan kebaikan tanah air yang paling siap berkorban bagi masyarakatnya. Mengenai masyarakat Arab, menurut

¹⁶ Abdul Hamid Al Ghazali, h.218.

¹⁷ Iqbal dan Nasution, *Pemikiran politik Islam*, h.201.
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 18 Januari—Juni 2022

Hasan al-Bana adalah suatu keniscayaan demi mengembalikan kejayaan Islam, tegaknya Negara dan tegaknya kehormatannya kedaulatannya.

9. Hak Asasi Manusia

Pandangan Hasan al-Bana tentang hak asasi manusia ialah bahwa hal tersebut merupakan kewajiban agama.¹⁸ Sedangkan penghormatan hak asasi manusia adalah tuntutan sosial dan Negara. Hasan al-Bana meyakini bahwa kebebasan manusia adalah jalan menuju kebaikan kebangkitan dan kreativitas. Hasan al-Bana senantiasa menyeru persamaan dalam menikmati hak-hak asasi manusia, sebab persamaan merupakan jalan menuju sistem dunia baru yang dapat melawan kedzaliman dan permusuhan.

10. Pemerintahan Islam (Khilafah)

Misi Hasan al-Bana adalah misi pembangkitan dan penyelamatan. Warisan yang paling berat yang menjadi tanggung jawabnya adalah meninggikan kalimah Allah SWT. mengunggulkan syariat-Nya. Atas dasar itu maka tujuan dan sasaran Hasan al-Bana secara umum dalam perspektif politik adalah kemerdekaan negeri Islam dari segala kekuasaan asing dan berdirinya Negara (pemerintah) Islam yang merdeka di negeri tersebut memproklamkan prinsip-prinsip Islam dan menyampaikan misinya yang adil dan bijaksana ke segenap umat manusia.

Adapun sarana untuk mencapai tujuan menegakkan kembali khilafah itu ada tiga : 1) Keimanan yang mendalam. 2) Pembentukan (Takwin Konsolidasi) yang cermat. 3) Kerja yang permanen. Sedangkan sarana pelengkapannya adalah giat melatih diri untuk memikul semua itu dan bersiap untuk melaksanakannya dan optimis terhadap suksesnya sehingga negara ideal dapat terwujud.

F. Pengaruh Politik Hasan al-Bana terhadap Perpolitikan di Indonesia

Kondisi yang ada di Madinah pada saat itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia saat Islam masuk dan berkembang di Indonesia ini. Corak Islam di dunia melayu (Indonesia) yang khas ini kadang-kadang di anggap sebagai penyimpangan dari bentuk aslinya atau kerap dianggap sebagai Islam “pinggiran”. Penanaman ini disertai konotasi serta kurang dalam hal ketaatan, misalnya kurang taat ajaran, karena lebih di dominasi oleh kebudayaan lokal masing-masing, kurang menunjukkan ekspresi budaya keseharian sebagaimana yang dikembangkan di pusat ajaran Islam itu sendiri dan kurang dapat merealisasikan ajaran Islam dalam bentuk konsep dasar negara sebagaimana dalam konsep peradaban Islam di Timur Tengah.

Sikap pemikiran Hasan al-Bana terhadap pemerintahan, berkaitan erat dengan pemahaman akan esensi Islam dan Aqidah. Islam sebagaimana yang dipersepsikan Ikhwanul muslimin menjadikan pemerintah sebagai salah satu pilarnya. Ikhwan memandang bahwa pemerintah Islam memiliki kaidah-kaidah yang tercermin dalam ulasan al-Bana ketika membicarakan tentang problematika hukum di Mesir dan bagaimana memecahkannya berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Pilar-pilar itu ada tiga : 1) Tanggung jawab pemerintah dalam arti bahwa ia bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. 2) Kesatuan umat artinya ia harus melakukan amar

¹⁸ Iqbal dan Nasution, h.227.
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 18 Januari—Juni 2022

makruf nahi mungkar dan nasehat, dan 3) Menghormati aspirasi rakyat, artinya diantara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka.

Hasan al-Bana merupakan tokoh kharismatik yang begitu dicintai oleh pengikutnya. Cara memimpin jamaahnya bagai seorang syekh sufi memimpin tarekatnya. Al-bana dalam segi gerakan sangat memperhatikan fungsi setiap komponen organisasi. Hasan al-Bana melalui ikhwanul muslimin yang saat itu jaringannya telah tersebut, juga ikut menggalang dukungan-dukungan negara Arab lainnya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, setelah Mesir negara-negara Timur Tengah lainnya mendukung kemerdekaan Indonesia.

Mengenai difusi pemikiran pada dasarnya untuk dikemukakan berkenaan dengan studi pengaruh pemikiran arah nasional (paham religio-politik lintas negara) kedalam suatu negara atau sebuah gerakan maupun organisasi. Menurut anders uklin, difusi secara sederhana diartikan sebagai proses pengiriman pesan dari pengirim (sender) kepada penerima (resever).¹⁹

Peran ikhwanul muslimin dalam kemerdekaan Indonesia, itu masih dapat di telusuri jejaknya dalam artikel bertajuk ikhwanul dan Indonesia. Disana dicantumkan foto-foto tokoh bangsa seperti syahril dan H. Agus Salim yang menemani Mursyid 'am Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Bana untuk menyampaikan terimakasih atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia.

Kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kancah politik nasional menjadi terbuka setelah reformasi orde baru yang berkuasa 32 tahun. Pada pemilu pertama orde reformasi kemudian muncul partai-partai Islam yang menggunakan nama Masyumi, seperti partai Masyumi Baru dan partai politik Islam Indonesia Masyumi.²⁰ Selain itu berdiri juga Partai Bulan Bintang (PBB) dan pada pemilu itu pula muncul Partai Keadilan kini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan perpanjangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir yang mewadahi komunitas terbaik kalangan muda Intelektual yang sadar akan agama, negeri, dunia dan zamannya. Namun tulisan ulama yang kini bermukim di Qatar itu belum pernah mendapat konfirmasi dari pada pengurus DPP PKS.²¹ Dalam transformasi pemikiran Hasan al-Bana terhadap PKS dapat dilihat melalui:

1) Interaksi Sosial

Berawal dari para aktivitas gerakan Tarbiyah yang ada dikampus-kampus di seluruh Indonesia, mereka adalah para mahasiswa yang berusaha untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai ajaran Agama Islam keseluruh umat Islam yang merasa asing dan kabur terhadap ajaran agamanya sendiri. Pada dasarnya mereka dalam pemikiran banyak dipengaruhi oleh pemikiran politik Hasan al-Bana yang berasal dari Mesir.

Sejak abad ke-17 banyak ulama-ulama Indonesia yang mendapatkan otoritas keagamaannya dari Mekkah dibawah bimbingan ulama-ulama besar Haramain. Sekembalinya mereka ke tanah air, mereka membimbing umat Islam Indonesia tentang

¹⁹ Yon Mahmudi, *Partai Keadilan Sejahtera : Wajah Baru Islam Politik Indonesia* (Bandung: Harakata Publishing, t.t.), h.61.

²⁰ "Ikhwanul Muslimin," t.t., <http://id.wikipedia.org/wiki/ikhwanul>.

²¹ Yusuf Qardawi, *Umat Islam Menyosong Abad 21* (Solo: Era Intermedia, 2000), h.92.
Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 18 Januari—Juni 2022

ajaran-ajaran agama Islam. Pengaruh Mesir terhadap Indonesia mulai menguat setelah Indonesia merdeka, karena hubungan intelektual dan keagamaan inilah yang menjadikan Mesir sebagai satu-satunya Negara di Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan Indonesia, pengakuan ini pun tidak lepas dari pengaruh organisasi besar al ikhwan, yang secara khusus membentuk biro luar negeri yang mendukung pembebasan bangsa-bangsa muslim diberbagai belahan dunia untuk melakukan lobi kepada pemerintah yang berkuasa dinegara-negara muslim untuk mendukung setiap langkah umat Islam dalam mencapai kemerdekaan hingga tahun 1990an jumlah mahasiswa Indonesia yang study di Mesir berkisar ribuan orang.²²

Transformasi pemikiran ini bermula dari kontak pertama para aktivis gerakan Tarbiyah dengan pemikiran al ikhwan yang terjadi melalui mediasi Saudi Arabia. Hal ini terjadi karena Saudi Arabia ingin mengokohkan posisinya sebagai Khadimul Haramain (pemilik dua kota suci, Mekkah dan Madinah) bagi negara-negara muslim yang lain. Selain itu Arabia tidak menginginkan pengaruh revolusi Iran yang beraliran syi'ah mendapatkan simpati di negara-negara muslim non Arab, banyak tokoh-tokoh akademisi al ikhwan dari Mesir yang mendapatkan tekanan di negaranya kemudian hijrah ke Saudi dan mengajar di Universitas-universitas kenamaan di Saudi.

Dari sinilah kemudian interaksi pemikiran terjadi yang melibatkan Indonesia sebagai penerima dan Timur Tengah sebagai pemasok ide. Alumni Saudi yang menyelesaikan studi tahun 1980an kembali ke Indonesia dan mentransfer pemikiran baru ini kepada generasi muda muslim Indonesia. Pemikiran ini kemudian mengalami sintesis dengan pemikiran-pemikiran Islam lokal yang sudah berkembang saat itu.²³

Gerakan Tarbiyah yang merupakan metamorphosis al Ikhwan di Indonesia menjadikan kampus sebagai kawah Candra dimuka perekrut dan pembinaan para kadernya. Ini terjadi hingga era 90an. Namun, bersama dengan tumbangnya orde baru sebagai simbol absolutisme di Indonesia, dan melajunya lokomotif reformasi tahun 1998, maka Gerakan Tarbiyah mencari platform berbeda untuk melakukan perubahan dalam masyarakat Indonesia, terutama umat yang lainnya. Platform dipilih sebagai alternatif final yang paling cocok untuk kondisi kontemporer saat ini. Maka tanggal 9 Agustus 1998 dideklarasikan pendirian Partai Keadilan, Partai Keadilan (kini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS) merupakan perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir yang mewadahi komunitas terbaik kalangan muda Intelektual yang sadar akan agama, negeri dunia dan zamannya. Benar itulah fakta yang selalu mengaspirasi bahwa tiada kebaikan dalam agama yang menafikan politik dan sebaliknya politik yang hampa nilai-nilai agama karena politik semacam ini merupakan politik dalam konsep Barat. Sementara Islam dengan politiknya membawa misi pembahagian manusia di dunia maupun akhirat kelak. Sebuah politik yang melindungi semua hak mereka sehingga diharapkan pada suatu saat nanti umat Islam dan non Islam menggunakan etika politik Islam yang akan melahirkan kebahagiaan bagi mereka. Sehingga mereka bisa hidup tenang, damai dan tentram serta terlindungnya nyawa, harta dan kehormatan.

²² Yon Mahmudi, "Partai Keadilan Sosial," t.t., h.62.

²³ Yon Mahmudi, h.66-67.

2) Karya-karya Hasan al-Bana

Selain lewat jalur pendidikan langsung pengaruh pemikiran dan gerakan al-ikhwan juga melalui buku-buku yang memuat pemikiran dan nilai-nilai ideologi al-ikhwan baik yang ditulis oleh Hasan al-Bana langsung maupun yang ditulis oleh tokoh-tokoh al-ikhwan. Buku-buku ini ditegakkan dari bahasa aslinya, bahasa Arab oleh para cendekiawan dan pemikir Indonesia yang notabene merupakan alumni Timur Tengah.

Penutup

Dari uraian diatas dapat disampaikan bahwa:

1. Hasan al-Bana sebagai salah satu tokoh politik pergerakan Islam yang memiliki pengaruh di Mesir dan termasuk tokoh-tokoh di Indonesia. Pemikiran politik Hasan al-Bana, setidaknya ada empat hal yakni Urubah (arabisme), wathaniyah (patriotisme), Qauniyah (Nasionalisme), dan alamiyah (Internasionalisme). Beberapa hal dalam sikap politik Hasan al-Bana adalah: 1) Pemerintah, 2) Undang-undang, 3) Undang-undang dasar, 4) Kepartaian, 5) Minoritas dan orang asing, 6) Partisipasi perempuan dalam politik, 7) Demokrasi, 8) Persatuan, 9) Hak azazi manusia, 10) Pemerintahan Islam (khilafah).
2. Pengaruh politik Hasan al-Bana di Indonesia. Dalam karyanya Majmuah al-Rasail al-Bana membahas persoalan dunia Islam yang terjadi saat itu salah satunya adalah Indonesia. Indonesia mengalami tekanan dari penjajah Belanda yang berambisi menjauhkan bangsa muslim yang punya semangat tinggi dengan hak asasinya sebagai manusia yakni kebebasan dan kemerdekaan. Hasan al-Bana melalui al-ikhwanul muslimin yang saat itu jaringannya telah tersebar, dan juga mendukung menggalang dukungan Negara Arab dan lainnya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada pemilu pertama orde reformasi bermunculan partai-partai Islam yang menggunakan nama masyarakat baru, dan Partai Politik Islam Indonesia seperti PKS, PPII, PBB dan LDII. Proses transformasi pemikiran politik Hasan al-Bana terhadap perpolitikan di Indonesia pada dasarnya melalui dua hal yaitu interaksi sosial dan karya-karya Hasan al-Bana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Al Ghazali. “Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan al- Bana.” Era Intermedia, 2001.
- Hasan al-Bana. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*. Solo: Era Intermedia, 2012.
- “Ikhwanul Muslimin,” t.t. <http://id.wikipedia.org/wiki/ikwanul>.
- Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran politik Islam: dari masa klasik hingga* Jurnal TAPIS Vol. 18 No. 18 Januari—Juni 2022

- Indonesia kontemporer*. Cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran politik Islam tematik: agama dan negara, demokrasi, civil society, syariah dan HAM, fundamentalisme, dan antikorupsi*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jilid II*. Cet. 6. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Yon Mahmudi. *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Bandung: Harkata Publishing, t.t.
- . “Partai Keadilan Sosial,” t.t.
- Yusuf Qardawi. *Umat Islam Menyosong Abad 21*. Solo: Era Intermedia, 2000.